

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2014: 10)

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:4) :

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

"Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent"

Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah:

"Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) pengertian audit adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Jenis-jenis Audit

Auditing dapat dibagi dalam beberapa jenis yang dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut.

Terdapat tiga jenis audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12) yaitu sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang divertifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan

menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saji lainnya.

2. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

3. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

Menurut Soekrisno Agoes (2017:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

2. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*)

yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

3. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing (EDP)*

Berdasarkan jenis-jenis auditing di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari berbagai jenis audit yang dilakukan, keseluruhan audit memiliki tujuan yang hampir sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.1.1.2 Tujuan Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:3)

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”

Menurut Mulyadi (2014:7), tujuan audit adalah:

“Tujuan auditing dinyatakan secara terperinci adalah proses sistematis tersebut ditunjukkan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan untuk mengevaluasi tanpa memihak dan berprasangka terhadap buktibukti tersebut”

Dari beberapa tujuan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan

memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standar auditing.

Standar Audit

Untuk mencapai mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Berbeda dengan prosedur, Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2017:56) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independent dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan *supervisi*, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai audit *field work*.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

3. Standar pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis menginterpretasikan bahwa standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

2.1.1.3 Tahapan Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:9) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
 - a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk:
 - 1) Mengetahui latar belakang bidang usaha klien
 - 2) Memahami struktur pengendalian internal klien
 - 3) Memahami sistem administrasi pembukuan
 - 4) Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan
 - c. Mengajukan proposal audit kepada klien
Untuk klien lama, dilakukan penelaahan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.
 - d. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien
 - e. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan
 - f. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup:
 - 1) Menyiapkan staff yang bergabung dalam tim audit
 - 2) Membuat program audit termasuk tujuan audit dan prosedur audit
 - 3) Menentukan rencana dan jadwal kerja
2. Pengujian Atas Pengendalian dan Pengujian Substansi Transaksi (*Test of Controls and substantive test of Transaction*)
 - a. Pengujian Substantif (*Substantive Test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
 - b. Pengujian Pengendalian (*Test of Control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balance*)
 - a. Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan,

penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu.

- b. Pengujian terinci atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, rekonsiliasi bank, dll.

4. Penyelesaian Audit (*Completing the Audit*)

- a. Menelaah kewajiban bersyarat (*Contingent liabilities*)
- b. Menelaah peristiwa kemudian (*Subsequent events*)
- c. Mendapatkan bahan bukti akhir, surat pernyataan klien
- d. Mengisi daftar periksa audit (*Audit check list*)
- e. Menyiapkan surat manajemen (*Management letter*)
- f. Menerbitkan laporan audit
- g. Mengomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis sampai pada pemahaman bahwa dalam melaksanakan penugasan, auditor memiliki tahap-tahap yang harus diselesaikan sebelum memasuki tahap lainnya guna mendapatkan hasil yang berkualitas.

2.1.1.4 Jenis-jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dialihbahasakan oleh Herman Wibowo dan Tim Perti (2017:15) ada beberapa jenis auditor sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik
Bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
2. Auditor Badan Antabilas Pemerintah
Auditor yang bekerja untuk *Government Accountability Office (GAO) A.S.* sebuah badan nonpartisan dalam cabang legislatif pemerintah federal.

Dengan diketuai oleh *Comptroller General*, GAO hanya melapor dan bertanggung jawab kepada kongres.

3. Agen penerimaan negara
IRS , di bawah arahan *Commissioner of Internal Revenue*, bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan
4. Auditor internal
Dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO mengaudit untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi system komputer.

Dari jenis auditor diatas, dapat diinterpretasikan bahwa jenis auditor menurut Arens, Elder dan Beasley ada lima jenis utama audit yang terdiri dari: pertama, Kantor Akuntan Publik. Kedua, Auditor Internal Pemerintah. Ketiga, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, Auditor Pajak. Kelima, Auditor Internal.

2.1.2 Pengendalian Mutu Audit

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Mutu Audit

Menurut IAPI (2013:4) sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KAP. Berdasarkan SPM 1, KAP berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- a) KAP dan personelnnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

- b) Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

Menurut Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2017:43) definisi pengendalian mutu adalah:

“Pengendalian mutu bagi sebuah KAP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak lain-lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya”.

Menurut SPAP (2011) dalam SPM seksi 100 No. 03 definisi pengendalian mutu adalah:

“Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP.”

Dengan demikian pengendalian mutu pada suatu KAP dengan KAP lain akan bervariasi dalam sifat dan ruang lingkupnya. Dalam hubungan dengan pengendalian mutu KAP, tim auditor bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat ditetapkan terhadap erikatan audit dan memberikan informasi yang relevan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu merupakan tanggung jawab profesional auditor kepada klien dan pihak-pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KAP pada setiap penugasannya dan konsisten diataati dalam setiap kontrak kerjanya. Dengan demikian pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan suatu KAP.

2.1.2.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu Audit

Menurut Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dialihbahasakan oleh Herman Wibowo dan Tim Perti (2017:45) system pengendalian mutu audit dibagi ke dalam 6 (enam) unsur adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan
Perusahaan harus mempromosikan budaya bahwa kualitas adalah hal yang esensial dalam melaksanakan penugasan dan harus menetapkan kebijakan serta prosedur yang mendukung budaya tersebut.
- b. Persyaratan etis yang relevan
Seluruh personel yang bertugas harus melaksanakan semua tanggung jawab profesionalnya dengan penuh integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
- c. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan profesional
- d. Sumber daya manusia
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa:
 - Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten
 - Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai
 - Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan
 - Personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan
- e. Kinerja penugasan
Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri
- f. Pemantauan

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif

Menurut Indra Bastian (2018:54) unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, attestasi dan konsultasi dibagi ke dalam 9 (sembilan) unsur adalah sebagai berikut :

- a. Independensi
Meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi.
- b. Penugasan personel
Meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan.
- c. Konsultasi
Meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai.
- d. Supervisi
Meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
- e. Pemekerjaan (hiring)
Meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
- f. Pengembangan profesional
Meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP.
- g. Promosi (advancement)
Meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. Penerimaan dan berkelanjutan klien
Menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan

untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang menajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*).

i. Inspeksi

Meyakinkan bahwa produser yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

Dari beberapa unsur-unsur di atas dapat diketahui setiap KAP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Prosedur itu akan tergantung pada hal-hal seperti ukuran yang jumlah cabang yang berpraktik, serta sifat praktik. Sistem pengendalian mutu harus mencakup kebijakan dan prosedur yang terkait dengan keenam unsur itu.

2.1.2.3 Hubungan Pengendalian Mutu dengan Kualitas Audit

Menurut Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dialihbahasakan oleh Herman Wibowo dan Tim Perti (2017:46) Hubungan antara standar auditing, pengendalian Mutu, *AICPA Practice Centers* dan *Peer Review*

a. Standar Pengendalian Mutu

Standar yang diberlakukan pada suatu KAP untuk membantu memenuhi standar *auditing*.

b. Standar *Auditing*

Standar yang diberlakukan pada setiap audit

c. *Audit Practice and Quality Centre*

Organisasi yang dimaksudkan untuk membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu dan standar audit

d. *Peer Riview*

Metode untuk menentukan apakah suatu KAP memenuhi standar pengendalian mutu

Peer riview ini menguntungkan KAP karena membantu memenuhi standar pengendalian mutu yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani peer review dapat memperoleh manfaat lebih jauh jika review itu meningkatkan praktik KAP, sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitasnya serta memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.

AICPA telah menetapkan praktik audit dan pusat mutu sebagai pusat sumber daya untuk meningkatkan mutu praktik audit. Center for Audit Quality (CAO) adalah organisasi kebijakan publik otonom yang berafiliasi dengan AICPA yang melayani investor, auditor perusahaan public, dan pasar modal.

Misi *centres* ini adalah membantu mempertebal keyakinan Ketika menjalani proses audit dan membuat audit perusahaan public menjadi jauh lebih andal serta relevan bagi investor. *Private Companies Practice Section* (PCPS) menyediakan praktik informasi manajemen bagi perusahaan dari segala ukuran.

2.1.3 Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.1.3.1 Pengertian Reputasi

Pengertian Reputasi menurut John Dalton (2003:12):

“Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, based on their perception and interpretation of the image that the company communicates over time.”

Pada saat ini sebagian masyarakat awam menganggap bahwa reputasi sama dengan citra. Berikut ini akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan Reputasi dan Citra. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman mengenai perbedaan antara Reputasi dan Citra.

“Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan.”

(Basya, dalam Basya dan Sati. 2006: 6). Sedangkan

“Citra adalah apa yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu subyek berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh perusahaan dari hasil komentar, iklan, dan dari sumber lain. Atau ada yang berpendapat Citra adalah persepsi mengenai perusahaan atau merek suatu produk yang ada di benak konsumen”.

Peter dan Olson (2002:381).

“Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan dan kesalahpahaman mengenai antara citra dan reputasi. Kesannya sama seperti reputasi, namun citra lebih berkonotasi superfisial atau ilusi. Penampilan sesaat dapat menciptakan citra, namun reputasi lebih membutuhkan konsistensi dan pemahaman.”

Dengan demikian citra merupakan salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi yang selayaknya terus menerus dibangun dan dipelihara. Sedangkan reputasi mencakup persepsi dari stakeholders mengenai seluruh aspek organisasi

yang akan menjadi salah satu faktor penentu utama bagi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuannya

2.1.3.2 Pengertian Reputasi Kantor Akuntan Publik

Menurut Griffin pengertian reputasi kantor akuntan public adalah *'Corporate image can created, but corporate reputation must be earned'*. Ini berarti untuk membuat suatu reputasi benar-benar harus memiliki langkah dan perencanaan yang tepat dan berjalan terus menerus dengan menjadi pendengar apa yang dikatakan para *stakeholder* perusahaan.

Reputasi baik yang disandang Kantor Akuntan Publik merupakan prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar yang dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut. Cameran (2005) menyatakan bahwa reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika:

“Kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik.”

Reputasi Kantor Akuntan Publik akan berbanding lurus dengan Reputasi Akuntan Publik yang merupakan sumber daya utama yang ada di Kantor Akuntan Publik. Selain itu waktu yang digunakan Kantor Akuntan Publik bereputasi baik lebih efisien, karena sumber daya yang dimiliki berkualitas.

Rick Hayes et. al., (2014:26) menyatakan:

“The four largest accountancy firms in the world (known as the Big Four) influence international auditing because of their day-to-day operations in many countries and their membership in most of the world’s professional accounting organizations. All of these firms have revenues of billions of dollars. The Big Four are: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, and PricewaterhouseCoopers.”

Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia yang biasa disebut dengan *the Big Four* mempengaruhi audit Internasional karena setiap harinya *the Big Four* beroperasi di beberapa Negara dan KAP Lokal yang berafiliasi dengan *the Big Four*. Sebagian besar merupakan KAP Profesional. Kantor Akuntan Publik bereputasi dalam hal ini diprosikan KAP yang berafiliasi dengan KAP *the Big Four*. Setiap *partners* di *the Big Four* mempekerjakan staff profesional untuk membantu *partner* dalam pekerjaannya.

Dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, setiap perusahaan diminta untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan biasanya menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik (Astina, 2013).

2.1.3.3 Tipe Kantor Akuntan Publik

Pengklasifikasian KAP juga dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001:2001-2002) membedakan KAP yang beroperasi di wilayah Indonesia menjadi dua yaitu:

1. Bekerjasama dengan kantor akuntan asing, dan

2. Tidak bekerjasama dengan kantor akuntan asing

Menurut Marisi P. Purba (2012:146). KAP dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Jumlah auditor yang bekerja pada KAP
2. Wilayah yang menjadi cakupan KAP dan,
3. Reputasi

Berdasarkan jumlah auditor yang bekerja KAP digolongkan atas:

1. KAP kecil dengan jumlah auditor staf tidak lebih dari 25 orang
2. KAP menengah dengan jumlah auditor staf antara 25 sampai dengan 50 orang, dan
3. KAP besar dengan jumlah auditor staf lebih dari 50 orang.

Al Haryono (2001) mengklasifikasikan KAP berdasarkan wilayah kerjanya menjadi: KAP Internasional, KAP Nasional, KAP Regional dan KAP Lokal.

Berdasarkan reputasi KAP digolongkan atas:

1. KAP Big-Four dan
2. KAP non Big-Four

Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum Indonesia ada 2 jenis yaitu

Al Haryono (2001):

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan

2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan.

KAP yang berafiliasi adalah bentuk usaha kerjasama antara KAP Lokal dengan KAP Internasional (Asing). KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis informasi dan pendidikan lanjutan Arens dan Loebbecke (2003)

Sekar (2003) menyatakan bahwa penelitian tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan non afiliasi dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula bahwa investor mempersepsikan auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas didukung oleh penelitian Mayangsari (2002) bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya KAP tersebut.

2.1.3.4 Ukuran Reputasi Kantor Akuntan Publik

Reputasi dalam hal ini menunjuk pada besarnya ukuran KAP dilihat dari jumlah klien dan revenue yang dihasilkan KAP yang berskala besar apabila termasuk dalam the big four firm, sedangkan untuk KAP yang berskala kecil apabila tidak termasuk dalam the big four firm (Saputri, 2012).

Menurut Arens et al. (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar

Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.

2. Kantor Nasional

Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .

3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar

Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.

4. Kantor Lokal Kecil

Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

Widyantari (2010) menjelaskan bahwa sebelum tahun 2003, terdapat lima KAP besar di dunia yang disebut The Big Five Auditors yaitu Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

Di Indonesia terdapat beberapa kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik (KAP) big four dan kantor akuntan publik (KAP) non big four. Berikut adalah empat kantor akuntan publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan big four pada tahun 2010-2014:

Pada tahun 2010, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan big four yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young (E&Y)
2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte),
3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG)
4. KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Pada tahun 2011, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan big four yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young (E&Y),
2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte),
3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG),
4. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Pada tahun 2012-2014 empat KAP Lokal yang berafiliasi dengan big four yaitu:

1. Tanudiredja, Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).

2. Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernest & Young (EY).
3. Osman Bing Satrio dan Rekan Berafiliasi dengan Delloite Touch Thomatsu (Delloite).
4. Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG)

Berikut adalah empat kantor akuntan publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan non big four:

1. Abubakar Usman & Rekan berafiliasi dengan GMN International
2. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto berafiliasi dengan RSM international
3. Chaeroni & Rekan berafiliasi dengan Affilica International
4. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang berafiliasi dengan BKR International

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Boyton, et, al, (2016:7) pengertian kualitas audit adalah :

“Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran-ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan. Kualitas Jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan.”

Menurut Arens *et al* (2015:105) definisi kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality means how tell an audit detects and report material misstaments in finacial statement. The detection aspect is a reflection of

auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas audit yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Kemampuan mendeteksi kesalahan merupakan refleksi atau gambaran dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan melaporkan kesalahan berkaitan dengan etika atau integritas auditor yang diproksikan dengan independensi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa standar *auditing* yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit.

2.1.4.2 Aspek-aspek Kualitas Audit

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil (Andri, 2017).

Menurut Amrin Siregar (2015:233) dalam Mathius Tadionting (tahun) dalam penulis jurnal,(tahun) aspek dari kualitas audit meliputi:

1. *Input Oriented*

Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.

2. *Process Oriented*

Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu

laporan audit. Orientasi proses (Process Oriented) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.

3. *Outcome Oriented*

Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientansi keluaran (outcome oriented) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tidak lanjut atas rekomendasi audit.”

2.1.4.3 Pengukuran Kualitas Audit

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut (Efendy,2010) :

1. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme).
Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.
2. Kualitas Hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit)
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.
3. Kualitas tindak lanjut hasil audit
Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

2.1.4.4 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) dalam Landarica & Arizqi, (2020)

langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas audit, sebagai berikut:

1. Perlunya melanjutkan Pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, aritnya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun,
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan *supervise* dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas maka terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut dapat membantu untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian mutu dan reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Mutu Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:38) bahwa

“audit standards require each firm to establish quality control policies and procedures that can encourage the achievement of audit quality”

Dalam definisi Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley & Hogan (2017:38) menjelaskan bahwa standar audit mengharuskan setiap perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas yang dapat mendorong tercapainya kualitas audit.

Menurut IAPI (2011) bahwa keberadaan sistem pengendalian mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Standar pengendalian mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang di hasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem pengendalian mutu sangat dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik. Hal ini berarti semakin auditor mematuhi standar profesional akuntan publik, maka semakin baik kualitas audit yang di hasilkan.

2.2.2 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit kerap kali dikaitkan ada hubungannya dengan kualitas dari KAP yang mengaudit. Berdasarkan teori agensi, untuk meminimalkan masalah asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal maka dibutuhkan pengawasan oleh pihak ketiga yang bersikap independen yaitu Kantor Akuntan Publik. KAP yang bereputasi yaitu dalam hal ini KAP *Big 4* dipandang dapat berkontribusi untuk menciptakan audit yang berkualitas lebih baik daripada *NonBig 4*. Asumsi publik tersebut terbentuk karena KAP *Big 4* memiliki akuntan public yang berkompetensi dan bervariasinya pengalaman yang dimiliki. KAP *Big 4* juga memiliki jumlah klien yang sangat banyak dan sudah tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut mendorong KAP untuk menjaga reputasi yang telah dimilikinya yaitu dengan cara menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.3 Pengaruh Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Audit yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan (Shintya et al., 2016). Namun dalam menjalankan tugasnya auditor sering kali dihadapi dengan tekanan dan risiko, semakin banyak tekanan yang diterima oleh auditor dalam menjalankan tugasnya maka dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit.

Terdapat keterkaitan antara Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. Dilihat dari hubungan Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik secara timbal balik tersebut, di sisi lain

terdapat pengaruh dapat dipersepsikan bahwa seorang auditor yang memiliki kemampuan seperti sistem pengendalian mutu audit yang berfungsi untuk membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Reputasi KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melakukan audit secara professional. Reputasi KAP selalu dikaitkan dengan ukuran KAP besar, dimana KAP akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas karena auditor akan tergabung dalam KAP besar memiliki pengalaman dengan berbagai klien yang beragam, sehingga mereka mampu menghasilkan audit yang berkualitas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sherin Junisintya, Apry Linda Diana (2020)	Pengaruh sistem pengendalian mutu internal dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (Studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta)	Persamaan: - Variabel - Sistem pengendalian mutu - Variabel Kualitas Audit Perbedaan: - Kompetensi auditor	Hasil Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan system pengendalian mutu dan Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2.	Mar'atus	Sistem pengendalian	Persamaan: - Variabel	Sistem pengendalian

	Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati Dianwicakasih Arieftiara (2020)	mutu dan <i>audit situation</i> terhadap pemberian opini audit melalui <i>professional scepticism</i>	pengendalian mutu Perbedaan: - Variabel audit situation - Variabel pemberian opini audit - Variable profesional scepticism	mutu berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit
3.	Hadi Pratama dan Agus Munandar (2022)	Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit	Persamaan: - Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik - Kualitas Audit Perbedaan: - Rotasi Audit	Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan mengukur kualitas audit dengan menggunakan dimensi kualitas akrual. Semakin tinggi kualitas akrual, maka semakin tinggi juga kualitas audit. Kualitas akrual yang tinggi dalam tingkat kualitas pelaporan keuangan. Sehingga dengan meningkatnya tingkat kualitas pelaporan keuangan dapat meningkatkan

				kualitas audit perusahaan.
4.	Dian Elmawati (2018)	Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure dan Disclosure terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit <i>Tenure</i> - <i>Disclosure</i> - Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Reputasi kantor akuntan public (KAP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki probabilitas yang rendah dalam menerima opini audit <i>going concern</i> .
5.	Ilham Naffis Ramadhan Herry Laksito (2019)	Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), Audit Tenure dan Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik - Kualitas Audit <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Audit <i>Tenure</i> -Biaya Audi 	Hasil Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Maka keterhubungan Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik sangatlah mempengaruhi terhadap hasil yang akan dikeluarkan seorang auditor sebagai kualitas audit yang maksimal.

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ringkasan tabel penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Pengendalian Mutu	Kompetensi Auditor	Audit Situation	Reputasi Kantor Akuntan Publik	Rotasi Audit	Biaya Audit	Audit Tenur	Kualitas Audit
Sherin Junisintya, Apy Linda Diana	(2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>

Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara	(2020)	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Hadi Pratama dan Agus Munandar	(2022)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
Dian Elmawati	(2018)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Ilham Naffis Ramadhan, Herry Laksito	(2019)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muhammad Fadel Rahim	(2023)	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>

Keterangan :

Tanda : Diteliti

Tanda - : Tidak diteliti

Pada penelitian Sherlin Junisintya dan Apry Linda Diana yang berjudul pengaruh sistem pengendalian mutu internal dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit terdapat persamaan antara penelitian penulis yaitu pada variabel pengendalian mutu audit dan memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian, tahun penelitian dan beberapa variabel. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor akuntan publik di kota Bandung dan penelitian penulis hanya menggunakan pengendalian mutu sebagai variabel independen sedangkan penelitian Sherlin Junisintya dan Apry Linda Diana melakukan penelitian pada kantor akuntan publik (KAP) Jakarta. Pada penelitian Sherlin Junisintya dan Apry Linda Diana menggunakan variabel kompetensi auditor untuk tahun penelitian pada

Sherlin Junisintya dan Apry Linda Diana pada tahun 2020 sedangkan penulis pada tahun 2022.

Pada penelitian Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara yang berjudul Sistem pengendalian mutu dan audit situation terhadap pemberian opini audit melalui profesional scepticism terdapat persamaan antara penelitian penulis yaitu pada variabel pengendalian mutu audit dan memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian, tahun penelitian dan beberapa variabel. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor akuntan publik di kota bandung dan penelitian penulis hanya menggunakan pengendalian mutu sebagai variabel independen sedangkan penelitian Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara melakukan penelitian pada kantor akuntan publik (KAP) jakarta selatan. Pada penelitian Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara menggunakan variabel audit situation, pemberian opini dan profesional scepticism untuk tahun penelitian pada Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara pada tahun 2020 sedangkan penulis pada tahun 2022.

Pada penelitian Hadi Pratama dan Agus Munandar (2022) yang berjudul Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit terdapat persamaan antara penelitian penulis yaitu pada variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik dan kualitas audit dan memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian, tahun penelitian dan beberapa variabel. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor akuntan publik di kota Jakart dan penelitian penulis hanya menggunakan Reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel

independen sedangkan penelitian Mar'atus Solehah Nur Amjah, Erna Hernawati, Dianwicakasih Arieftiara melakukan penelitian pada kantor akuntan publik (KAP) jakarta selatan. Adapaun hasil dari pada penelitian Hadi Pratama dan Agus Munandar tersebut Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan mengukur kualitas audit dengan menggunakan dimensi kualitas akrual. Semakin tinggi kualitas akrual, maka semakin tinggi juga kualitas audit. Kualitas akrual yang tinggi dalam tingkat kualitas pelaporan keuangan. Sehingga dengan meningkatnya tingkat kualitas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas audit perusahaan.

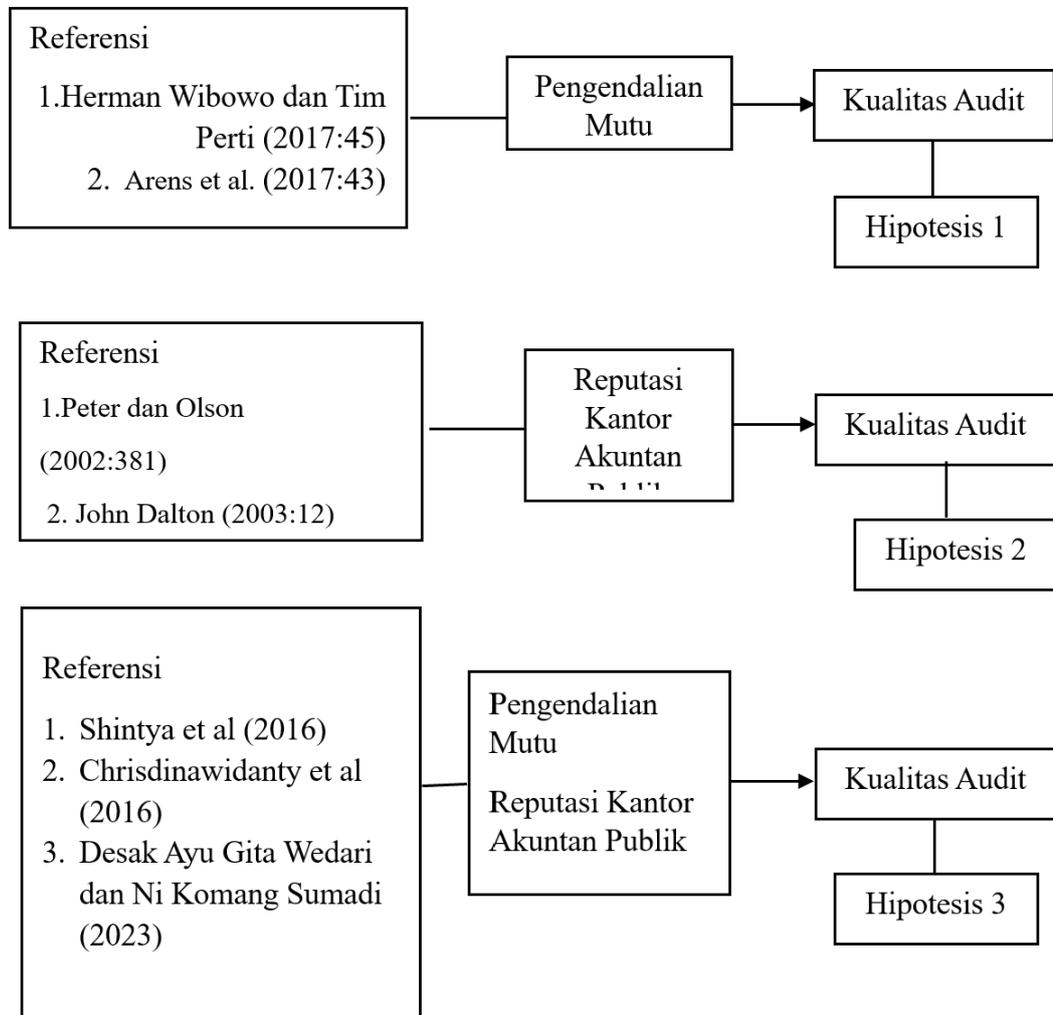
Dari penelitian Dian Elmawati (2018) yang meneliti Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure dan Disclosure terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern dengan variabel Independen yaitu Reputasi KAP, Audit Tenure dan Disclosure serta Variabel Dependen yaitu Opini Audit Going Concern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reputasi KAP, audit tenure dan disclosure terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian Hipotesis 1 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) signifikan secara statistik. Artinya, variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian Hipotesis 2 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel audit tenure tidak berpengaruh signifikan. Artinya, variabel audit tenure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian Hipotesis 3 dengan analisis regresi logistik pada disclosure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang menerima opini audit going concern mengarah kepada pengungkapan yang lebih besar.

Dari penelitian Ilham Naffis Ramadhan, Herry Laksito (2019) yang meneliti Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (Kap), Audit Tenure, Dan Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit dengan variabel Independen yaitu Reputasi Kantor Akuntan Publik (Kap), Audit Tenure, Dan Biaya Audit serta Variabel Dependen yaitu Kualitas Audit . Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (Kap), Audit Tenure, Dan Biaya Audit terhadap pemberian hasil audit yang memiliki kualitas yang sangat baik . Hasil pengujian Hipotesis 1 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) signifikan secara statistik. Artinya, variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap pemberian kualitas audit. Hasil pengujian Hipotesis 2 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel audit tenure tidak berpengaruh signifikan. Artinya, variabel audit tenure tidak berpengaruh terhadap pemberian kualitas audit. Hasil pengujian Hiptesesis 3 dengan analisis regresi logistik pada biaya audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian kualitas audit.. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang pemberian kualitas audit mengarah kepada pengungkapan yang lebih besar

2.2.5 Bagan Kerangka Pemikiran

Landasan Teori		
Pengendalian Mutu Audit	Reputasi kantor akuntan public	Kualitas Audit
1. Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2017:43) 2. Herman Wibowo dan Tim Perti (2017:45) 3. IAPI (2013:4) 4. Indra Bastian (2018:54)	1. John Dalton (2003:12) 2. Basya dan Sati. (2006: 6) 3. Peter dan Olson (2002:381) 4. Arens et al. (2012:32) 5. (Hartadi, 2009) 6. Griffin dalam buku <i>Crisis, Issues and Reputation Management</i> 7. Cameran (2005) 8. Rick Hayes et. al., (2014:26) 9. (Astinia, 2013) 10. Marisi P. Purba (2012:45) 11. Al Haryono (2001)	1. Amir Abadi Jusuf (2017:15) 2. Arens, et al (2015:105) 3. Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) 4. SPAP (2011:150) 5. Randal J.Elder, Mark S Beasley dan Alvin A.Arens,. dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) 6. Amrin Siregar (2015:233) 7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 8. Nasrullah Djamil dalam Landarica & Arizqi (2020)



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pengendalian Mutu dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit” yaitu:

Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik

terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh Pengendalian Mutu dan Reputasi

Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap Kualitas Audit